

# ANALISA PENERAPAN TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA DALAM PAJAK ADSENSE YOUTUBE PARTNER PROGRAM DI INDONESIA

Ni Putu Sephora Bunga Intan Perdamaian, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sephoraperdamaian@gmail.com](mailto:sephoraperdamaian@gmail.com)

Putu Tuni Cakabawa Landra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putusakabawa@yahoo.com](mailto:putusakabawa@yahoo.com)

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [idabagus\\_erwin@unud.ac.id](mailto:idabagus_erwin@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan besar pungutan pajak Adsense Youtube Partner Program serta hubungannya dengan Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kajian penelitian ini ditemukan bahwa apabila creator dapat mendaftarkan diri dengan benar, secara otomatis akan mendapatkan keuntungan dari Tax Treaty yaitu peringanan pemungutan pajak tambahan sebanyak 0%-30% Hubungan antara dasar hukum yang digunakan Youtube yaitu Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat dengan Tax Treaty tertulis dalam pasal 8 ayat 1 yakni keuntungan Tax Treaty dapat diterapkan pada pajak pendapatan individu yang tidak berdomisili di negara sumber selama usaha dimana pendapatan diperoleh bukanlah usaha tetap.

**Kata kunci:** Tax Treaty, Pajak Pendapatan, Peringanan Pemungutan Pajak.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the Adsense Youtube Partner Program tax and its relation with the Tax Treaty between Indonesia and the United States. The type of research used is normative legal research. The result of this research study is it was found that if creators were able to register correctly, they would automatically benefit from the Tax Treaty, namely a reduction in additional tax collection ranges from 0% -30%. The Tax Treaty is written in article 8, paragraph 1, namely the benefits of the Tax Treaty can be applied to the income tax of individuals who are not domiciled in the country of origin as long as the business where the income is obtained is not a permanent business.

**Keywords:** Tax Treaty, Income Tax, Reduction of Tax Collection.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berpijak pada Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat (*U.S. Internal Revenue Code*), saat ini bagi creator yang tergabung dalam Youtube Partner Program dikenakan pemotongan/pemungutan pajak.<sup>1</sup>Dengan kata lain, *U.S. Internal Revenue Code* berfungsi sebagai dasar hukum penentuan besar pajak yang perlu dibayarkan. Implementasi kebijakan hukum a quo juga diawasi oleh *Internal Revenue*

---

<sup>1</sup> Dian Kurniati, 2021, "Youtube Rilis Persyaratan Layanan Baru, Ada Poin Soal Pembayaran Pajak".  
[URL:https://news.ddtc.co.id/youtube-rilis-persyaratan-layanan-baru-ada-poin-soal-pembayaran-pajak-30140](https://news.ddtc.co.id/youtube-rilis-persyaratan-layanan-baru-ada-poin-soal-pembayaran-pajak-30140). Diakses pada 30 Januari 2023.

Service (IRS). Ketentuan tersebut diumumkan oleh *Youtube* melalui salah satu *email* berupa:<sup>2</sup>

*"We're reaching out because Google will be required to deduct U.S. taxes from payments to creators outside of the U.S. later this year (as early as June 2021). Over the next few weeks, we'll be asking you to submit your tax info in AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct, if any apply. If your tax info isn't provided by May 31st, 2021, Google may be required to deduct up to 24% of your total earnings worldwide."*

Ketentuan pemungutan pajak diperhitungkan dari perhitungan *AdSense*. Poin penting lainnya, pajak tersebut berlaku bagi seluruh creator dunia yang tergabung dalam *Youtube Partner Program* dengan nominal yang berbeda-beda tergantung kurs masing-masing negara. Keadaan demikian pada dasarnya sesuai dengan asas pembagian pajak yang disebut teori daya pikul. Prof. de Langen mendeskripsikan daya pikul dalam pemungutan pajak sebagai beban (sisa penghasilan) yang harus dibayarkan setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat pada akhirnya akan berimplikasi pada keberlakuan *Tax Treaty* salah satunya Indonesia. *Tax Treaty* sendiri merupakan sebuah perjanjian perpajakan antara dua negara yang bertujuan untuk meminimalisir adanya pajak berganda.<sup>3</sup> Dengan kata lain, *Tax Treaty* dapat dikatakan sebagai upaya penghindaran pajak berganda. Pernyataan tersebut sejalan dengan Hutagaol J dan Darussalam yang menyebutkan jika *Tax Treaty* merupakan salah satu modus penghindaran pajak yang memanfaatkan celah hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, praktik penghindaran pajak sudah marak dilakukan untuk mengurangi kerugian.<sup>4</sup>

Penentuan unsur pemajakan dalam *Tax Treaty* sendiri berbasis pada klausul-klausul dari kesepakatan negara-negara yang mengikatkan diri. Lebih lanjut pada peristiwa pemajakan *Youtube*, *Tax Treaty* mempunyai peranan penting. Apabila *creator* memenuhi syarat yang ditentukan dalam *Tax Treaty*, besar pajak yang dipungut dapat dikurangi secara signifikan sesuai dengan perjanjian masing-masing negara dengan Amerika Serikat. Dengan ini, maka *creator* dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari *Youtube Partner Program* selama mengisi dokumen-dokumen informasi pajak dengan baik dan benar.

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Aditya Fajar Indrawan, 2021, "Youtuber Kena Pajak Pemerintah AS, Begini Hitung-Hitungannya". URL: <https://voi.id/teknologi/39265/youtuber-kena-pajak-pemerintah-as-begini-hitung-hitungannya>. Diakses pada 30 Januari 2023.

<sup>3</sup> Putrida Sihombing. (2020). *Tax Treaty dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia dengan Amerika Serikat*. Jurnal Legislatif, 3(2), 303-321.

<sup>4</sup> Haidar Ammar Alfaruqi. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. (118).

<sup>5</sup> Rachmatullah Oky. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf: Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia. (2)

Salah satu penulisan sebelumnya yang membahas topik terkait pajak *Youtuber* adalah "Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Asing Yang Mendapat *Endorse* Dari Pelaku Usaha Di Indonesia" karya Widya Permata Sari<sup>6</sup>. Yang membedakan jurnal berikut dengan jurnal ini terlepas dari kesamaan subjeknya adalah cakupan lingkup jurnal ini membahas tentang warga negara Indonesia yang memperoleh pendapatan dari luar negeri yakni Amerika Serikat dan ikatannya dengan pengaturan pajak di Amerika Serikat tersebut secara langsung. Sedangkan jurnal karya Widya Permata Sari membahas warga negara asing berprofesi *Youtuber* yang menyalurkan jasa *endorse* kepada pengusaha Indonesia dan mendapat pendapatan dari orang Indonesia sehingga pajak pendapatannya tidak berkaitan dengan *Youtube* sendiri.

Adapula jurnal lainnya yang serupa membahas tentang *Tax Treaty* yakni "Tinjauan Yuridis *Tax Treaty* Indonesia Dengan Australia Sebagai Upaya Penghindaran Pajak Berganda Dalam Badan Usaha Tetap Ditinjau Dalam Perspektif Perdagangan Internasional" oleh Loist Villi Darmawan<sup>7</sup>. Perbedaan dari jurnal berikut dan jurnal ini adalah perbedaan negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia sehingga dasar hukum yang digunakan juga berbeda.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang mendasari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pungutan pajak pendapatan *creator* Indonesia dari *Youtube Partner Program* sebelum dan setelah menerapkan *Tax Treaty*?
2. Bagaimana pengaturan remisi pungutan pajak dari pendapatan *AdSense Youtube Partner Program* dalam *Tax Treaty*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk membantu memudahkan *creator Youtube* yang ingin mulai maupun yang sudah merintis kanal sebagai sumber penghasilan dalam memahami dasar hukum dari pajak penghasilan *AdSense Youtube Partner Program*, besar pungutan pajak penghasilan, remisi pungutan pajak penghasilan apabila mendaftarkan informasi pajak nasional dalam *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Amerika Serikat, juga untuk menganalisa hubungan antara *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Amerika Serikat dengan remisi pungutan pajak penghasilan dari pendapatan *AdSense Youtube Partner Program* serta dasar hukumnya.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal adalah penelitian dengan melakukan studi kepustakaan.<sup>8</sup> Lain halnya dengan E. Saefullah yang menerangkan jika penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisa

---

<sup>6</sup> Widya Permata Sari. (2019). Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Asing Yang Mendapat *Endorse* Dari Pelaku Usaha Di Indonesia.

<sup>7</sup> Loist Villi Darmawan. (2020). Tinjauan Yuridis *Tax Treaty* Indonesia Dengan Australia Sebagai Upaya Penghindaran Pajak Berganda Dalam Badan Usaha Tetap Ditinjau Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.

<sup>8</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram Press. (45).

hukum positif.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>10</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian-kajian tertulis, buku-buku hukum dan jurnal tertulis dari penelitian lainnya dengan topik serupa.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Dasar Hukum Pajak Youtube Partner Program

Menurut KBBI, *content creator* merupakan sebuah profesi menciptakan konten baik berupa tulisan, gambar, video maupun materi lainnya.<sup>11</sup> Konten tersebut kemudian dipublikasikan atau diunggah ke dalam media sosial seperti Youtube. *Creator* yang tergabung dalam *Youtube Partner Program* diwajibkan untuk mendaftarkan informasi pajaknya sehingga memudahkan pemungutan pajak.

Istilah sumber penghasilan dalam *Youtube* adalah monetise.<sup>12</sup> Hal tersebut diperoleh dari *AdSense*. Bagi *creator* maupun *Youtuber* dari seluruh dunia yang hendak mendapatkan penghasilan dari *Youtube Partner Program* harus melaksanakan pendaftaran informasi Wajib Pajak pribadi. Dengan didaftarkannya informasi Wajib Pajak pribadi pengguna, maka *Youtube* dapat dengan langsung memungut pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh *creator* apabila iklan dalam kontennya ditonton oleh pengguna yang demografinya berasal di Amerika Serikat maupun dari seluruh dunia.

Pajak penghasilan akan diambil dari total pendapatan *creator* setelah dipotong pembagian keuntungan oleh *Youtube*. Jadi, apabila *Youtube* mengambil 30% dari keseluruhan pendapatan, maka pajak akan dipotong dari 70% yang didapatkan oleh *creator*. Selain dari *AdSense*, pungutan ini juga berlaku untuk semua sumber penghasilan yang tercakup dalam *Youtube Partner Program* seperti *Superchat* dan *Membership*. Proses pemungutan pajak tersebut sejatinya sejalan dengan asas pemungutan pajak berupa:

- a. Asas *equality* yaitu disesuaikan dengan kemampuan
- b. Asas *certainty* yaitu didasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Asas *convenience of payment* yaitu dipungut pada saat yang tepat
- d. Asas *efficiency* yaitu dengan biaya yang tidak memberatkan.

Pengaturan pengenaan pajak *Youtube* menggunakan Pasal 3 Hukum Pendapatannya Dalam Negeri Amerika Serikat sebagai dasar hukum. Data dari pemungutan pajak juga wajib dilaporkan ke *Internal Revenue Service (IRS)*. Pajak yang harus dilaporkan hanyalah pajak yang dipungut dari penghasilan royalti yang didapatkan dari penonton berbagai demografi terlepas dimanapun negara domisili *creator*.

Besar dan ketentuan dari pemungutan pajak dapat berubah-ubah tergantung dari negara domisili *creator* dan kategori *creator* sebagai individu atau bisnis. Apabila pengguna diluar negara Amerika Serikat telah meregistrasikan informasi pajak pribadi yang valid, maka *Google* sebagai pemilik dari *Youtube* akan berperan sebagai Agen Pajak yang mewakilkan pengguna dalam menyetorkan pajak penghasilan dan melaporkannya ke IRS sesuai dengan besar penghasilan yang diperoleh dari Amerika Serikat.

---

<sup>9</sup> E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Kemi Media. (5).

<sup>10</sup> Muhaimin, *op.cit*, (56-57).

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Arti Creator*", URL: <https://www.kbbi.web.id/creator>. Diakses pada 2 Februari 2023.

<sup>12</sup> Husnun Azizah, *op.cit*, (21).

*Creator* yang telah melakukan registrasi atas informasi pajak pribadinya secara lengkap, nantinya akan mendapat formulir pemajakan. Penentuan tanggal penerimaan formulir tersebut tidak bergantung pada kapan Wajib Pajak melakukan pendaftaran karena pada dasarnya, menurut Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat pembayaran pajak hanya perlu dilakukan sekali setiap tahunnya.

### 3.2. Besar Pajak Youtube Partner Program

Besar pajak yang akan dipungut dari pendapatan *creator* yang diperoleh dari *Youtube Partner Program* tergantung pada jenis kanal yang dimiliki. Apabila kanal tersebut dimiliki oleh perusahaan penyiaran besar maka pajak yang dipotong hanyalah dari pendapatan yang bersumber dari penonton yang demografinya dari Amerika Serikat. Sedangkan untuk kanal pribadi maka pajak akan diambil dari seluruh pendapatan terlepas dari demografi penonton setelah itu ditambah lagi dengan yang bersumber dari penonton yang demografinya dari Amerika Serikat saja. Namun, apabila seorang *creator* berasal dari Amerika Serikat, maka *creator* tersebut tidak mempunyai kewajiban membayar pajak lagi. Meskipun demikian, *creator* tetap harus mengisi informasi pajaknya untuk mengantisipasi terjadinya penghindaran pajak.<sup>13</sup>

Pemungutan pajak *Youtube* pada dasarnya dilakukan secara otomatis dan nantinya akan dituangkan dalam laporan pembayaran *AdSense*. Spesifiknya, besaran pajak yang harus dibayarkan pada bulan berjalan akan diberitahukan pada bulan berikutnya. Jika ada masalah atau kesalahan yang terjadi di bulan sebelumnya, hal tersebut dapat langsung dicantumkan dalam laporan bulan saat itu. Besar presentase tarif pajak dapat diperiksa melalui bagian Kelola Informasi Pajak pada Setelah Pembayaran *AdSense*. Presentase tersebut muncul setelah formulir informasi pajak dikirimkan oleh individu dan hanya dapat dilihat melalui *Youtube Analytics*.<sup>14</sup>

Selanjutnya, jumlah pajak bagi *creator* yang berdomisili sekaligus merupakan kewarganegaraan di luar Amerika Serikat akan dipungut tarif pajak 0-30% dari total pendapatan yang diperoleh dari demografi Amerika Serikat. Pemotongan pajak ini juga memperhatikan ada tidaknya *Tax Treaty* di masing-masing negara dengan Amerika Serikat. Kemudian, bagi *creator* dengan kewarganegaraan dan domisili Amerika Serikat tidak dipungut potongan dari pajak karena pembayaran pajak dilakukan secara langsung dengan bantuan dari *Google* dan *Youtube* selama *creator* telah mendaftarkan dan mendaftarkan data informasi perpajakan mereka secara valid.<sup>15</sup>

Hal lain yang perlu diingat adalah apabila *creator* tidak mendaftarkan informasi pajaknya, maka *Google* dan *Youtube* akan mematok tarif pajak maksimum tergantung pada jenis akun *AdSense* dan kewarganegaraan serta domisili *creator*. Apabila *creator* memiliki akun *AdSense* bisnis, maka besar pajak yang harus dibayarkan adalah 30% dari

---

<sup>13</sup> Pusat Bantuan *Youtube*, tanpa tahun, "Mengirim Informasi Pajak Amerika Serikat Anda ke *Google*", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/10390801#zippy=%2Cnegara-saya-dan-amerika-serikat-memiliki-perjanjian-pajak-penghasilan-bagaimana-cara-memastikan-bahwa-detail-perjanjian-diterapkan%2Cdokumen-mana-yang-perlu-saya-siapkan-jika-info-pajak-amerika-serikat-saya-dilaporkan-untuk-ditinjau>. Diakses pada 2 Februari 2023.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pusat Bantuan *Google*, tanpa tahun, "Persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan *Youtube*", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=id#:~:text=Bisnis%20di%20AS%20dapat%20dikenai,yang%20diperoleh%20dari%20seluruh%20dunia>. Diakses pada 2 Februari 2023.



penghasilan yang diperoleh dari penonton yang berdemografi di Amerika Serikat. Sedangkan akun bisnis yang berdomisili di Amerika Serikat akan dipungut 24% dari total penghasilan yang diperoleh dari penonton di seluruh dunia. Apabila akun dimiliki oleh individu, dan belum mendaftarkan data pajaknya, maka pemungutan pajak sebesar 24% dari total penghasilan dari penonton di seluruh dunia dan ditambah 0-30% dari penonton khusus di Amerika Serikat sehingga totalnya akan berbeda-beda pada akhir pemungutannya.<sup>16</sup>

Sistem pemajakan di atas berlaku untuk pemungutan pajak oleh, dengan, dan dalam skala lingkup pendapatan yang diperoleh dari *Google* dan *Youtube*. Dengan kata lain, hal tersebut tidak merepresentasikan sistem pembayaran pajak dan pungutan pajak di Amerika Serikat secara keseluruhan sehingga pembayaran pendapatan dari perusahaan lainnya akan berbeda satu sama lainnya. Pungutan pajak ini akan secara langsung dibayarkan kepada pemerintah Amerika Serikat melalui perantara *Google* untuk memenuhi kewajiban pajak masing-masing individu *creator* di seluruh dunia baik yang mampu maupun tidak dalam pembayaran pajak secara langsung kepada IRS.

Penjelasan mengenai sistem pemungutan pajak dapat dideskripsikan melalui hipotesis berikut: apabila seorang *creator* dengan kanal pribadi memperoleh total pendapatan sebesar US\$1.000 dari *Youtube Partner Program* dengan pembagian keuntungan sebesar 45% maka total yang ia dapat adalah \$550 dan dari \$550 itu terdapat \$100 yang berasal dari demografi Amerika Serikat:

Pertama, karena ia telah memenuhi informasi pajaknya dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan keuntungan peringanan pajak berganda dari *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Amerika Serikat, maka pendapatan sebesar US\$550 itu tidak akan dipotong lagi karena ia sudah mendapatkan peringanan.<sup>17</sup> Sehingga total akhir yang ia dapatkan tetap \$550.

Kedua, apabila ia sudah mengirimkan informasi pajaknya namun belum mendaftarkan diri dalam peringanan pajak *Tax Treaty*, maka ia harus membayar hingga 30% dari US\$100 yang ia dapatkan dari penonton di Amerika Serikat sehingga sisanya adalah \$70. Jadi total sisa pendapatan yang ia peroleh adalah \$520 dari \$550.

Ketiga, *creator* tersebut tidak mendaftarkan datanya sama sekali dan tidak mendaftar peringanan *Tax Treaty*, maka \$550 ini kemudian dipotong 24% sebagai bentuk potongan pajak demografi seluruh dunia sehingga yang tersisa adalah \$418. \$100 dari \$418 kemudian dibagi lagi sebesar 30% untuk pajak demografi Amerika Serikat. Total yang tersisa adalah \$388 dari \$550

Selisih \$30 sampai \$132 tersebut mungkin tidak seberapa apabila dihitung dengan skala kecil seperti dalam hipotesis di atas, namun akan menjadi sangat merugikan apabila diaplikasikan dalam skala pendapatan yang lebih besar, terutama apabila demografi *creator* tersebut didominasi oleh Amerika Serikat.

Cara untuk menghitung sendiri perkiraan besar pungutan pajak *creator* adalah sebagai berikut:

- a. Buka Laporan Pendapatan pada *Youtube Analytics* kemudian tetapkan tanggal pembayaran yang ingin anda periksa ke dalam filter beserta mata uang dari negara domisili.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hasna Nabila, 2021, "Seperti ini Contoh Penerapan Pajak AdSense Youtube jika berlaku", URL: <https://www.cianjurtoday.com/bisnis-today/pr-9657217888/seperti-ini-contoh-penerapan-pajak-adsense-youtube-jika-berlaku?page=2>. Diakses pada 2 Februari 2023.

- b. Masukkan informasi geografis yaitu Amerika Serikat untuk melihat besar pendapatan yang diperoleh dari negara tersebut.
- c. Buka akun *AdSense* untuk memeriksa besar pungutan pajak dan hitung sesuai dengan klasifikasi data pajak masing-masing individu dan sudah-tidaknya terdaftar dalam peringanan pajak berganda masing-masing negara domisili.

Penting diingat cara di atas hanyalah untuk menghitung estimasi besaran pungutan pajak secara mandiri. Untuk kepastian besaran tetap ditentukan oleh *Google* dan dapat dilihat pada Laporan Transaksi Pembayaran *AdSense* setelah pendapatan diperoleh dan tanggal pemungutan pajak telah ditentukan. *Google* akan mengingatkan setiap *creator* agar tidak terjadi kesulitan. Semua *creator* yang bergabung dalam *Youtube Partner Program* wajib mendaftarkan informasi perpajakan lokalnya baik jika memperoleh pendapatan dari penonton dari Amerika Serikat maupun tidak karena diperlukan antisipasi apabila di kemudian hari *creator* mendapatkan sejumlah penonton dari Amerika Serikat baik dalam skala besar maupun kecil.

### 3.3. Hubungan *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Remisi Pajak *AdSense Youtube Partner Program*

*Tax Treaty* terdiri dari dua jenis yakni:

1. Model OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), dan;
2. Model UN (*United Nation*)<sup>18</sup>

Secara umum, *Tax Treaty* mempunyai keistimewaan yang mencakup:

1. *Tax Treaty* dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*),
2. *Tax Treaty* membatasi ketentuan yang ada pada regulasi pajak domestik,
3. *Tax Treaty* merupakan bentuk kompromi masing-masing negara yang mengadakannya,
4. *Tax Treaty* bersifat spesialis terhadap ketentuan pajak domestik.

Meskipun demikian, terhadap ketentuan hukum negara Amerika Serikat, ketentuan pajak federal yang lahir setelah adanya P3B dapat meng'*override*' *Tax Treaty*.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, ruang lingkup pembahasan *Tax Treaty* hanya dalam batasan PPh<sup>20</sup>, dimana pada penelitian ini mengkhususkan pajak yang berasal dari *Google* dan *Youtube* saja. Besar pajak yang diterapkan dalam *Youtube Partner Program* oleh *Google AdSense* adalah sebesar 27-30% dari total pendapatan yang diperoleh dari penonton yang berdomisili di Amerika Serikat. Terlepas itu, *creator* yang sudah mendaftarkan data pajaknya akan tetap mendapat pungutan pajak sebesar paling besar 24% akan dipotong dari keseluruhan pendapatan terlepas dari negara sumber penghasilan.<sup>21</sup>

Pada transaksi antar negara, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan seperti keuntungan maupun ancaman. Pada pemungutan pajak misalnya, negara sumber dapat meraup penghasilan yang sangat bagus untuk terus menggerakkan perekonomian negaranya. Namun dapat pula muncul permasalahan pengenaan pajak berganda yang diakibatkan dengan perbedaan sistem pemungutan pajak, perbedaan undang-undang,

---

<sup>18</sup> Cosmas Nico Sanjaya. (2000). Biaya Perdagangan Mitra Dan Produk Domestik Bruto Mitra Terhadap Foreign Direct Investment Negara-Negara Asia, Eropa Dan Amerika Di Indonesia Dengan Tax Treaty Sebagai Variabel Moderasi. (4).

<sup>19</sup> Klaus Vogel, *op.cit*, (3).

<sup>20</sup> Darussalaam dan Danny Septriadi, 2017. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.

<sup>21</sup> Pusat Bantuan Youtube, *op.cit*.

serta cara kerja organisasi dan badan-badan pemungutan pajak lainnya di seluruh dunia. <sup>22</sup>Inilah kegunaan dari adanya *Tax Treaty* antar negara.

Tax treaty antara Indonesia dan Amerika Serikat telah diratifikasi sehingga secara hukum dapat mengatur segala ketentuan mengenai keringanan pemungutan pajak antar negara baik dari negara domisili maupun negara sumber satu sama lain. Dengan ini, segala ketentuan dapat langsung diatur sesuai pasal-pasal yang tertulis dalam Tax treaty termasuk urusan peringanan pajak penghasilan *creator* dari *Youtube Partner Program*.

Hukum yang mengatur tentang peringanan pajak *creator Youtube Partner Program* terdapat pada Pasal 8a (1) Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Amerika Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan yang berbunyi:<sup>23</sup>

*“Laba usaha yang diperoleh oleh penduduk yang berasal dari satu diantara kedua Negara Pihak akan dikecualikan dari pemungutan pajak oleh salah satu Negara Pihak lainnya kecuali jika penduduk tersebut memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya. Jika penduduk tersebut memiliki seperti yang telah tertulis di atas, maka laba usaha tersebut dapat dikenakan pajak namun hanya yang penghasilannya berasal dari Negara Pihak tempat usaha tetap itu dibentuk dan dijalankan.”*

Laba usaha dalam konteks penelitian ini adalah penghasilan yang diperoleh *creator* dari *Adsense Youtube Partner Program* yang asalnya dari penonton yang berdemografi di Amerika Serikat. Nantinya, penghasilan yang dapat dicairkan oleh *creator* merupakan penghasilan bersih yang sudah tidak ada urusan wajib pajaknya lagi.

*Creator* diberi kemudahan dan keringanan dengan pelayanan yang disediakan oleh *Google* dimana *creator* tidak perlu mengurus pembayaran pajak secara langsung namun diwakilkan oleh pihak *Google* dan *Youtube* sendiri sebagai pemberi penghasilan. Pemungutan pajak sendiri dilaksanakan secara langsung dan terkalkulasi sehingga *creator* tidak perlu lagi kesulitan menghitung estimasi pungutan pajak yang harus dibayarkan. Algoritma yang digunakan oleh *Youtube* akan secara otomatis menghitung besar pungutan pajak *creator*.

Hal yang sama juga berlaku untuk kalkulasi peringanan pungutan pajak yang telah dihibahkan melalui adanya *Tax Treaty*. Meskipun begitu, *creator* selaku Wajib Pajak tetap diharapkan untuk menghitung dan memastikan sendiri besaran pajak harus dibayarkan nantinya agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahan di kemudian hari. Rumus yang dapat dipergunakan dalam penghitungan pajak pribadi adalah:<sup>24</sup>

$$\text{PPh dari Pendapatan Lainnya} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Pajak berganda dapat muncul jika terjadi benturan yurisdiksi pemajakan oleh pemerintah antar negara terkait dengan pengaturan pajak baik secara sistem maupun

---

<sup>22</sup> John Hutagaol, *op.cit.*

<sup>23</sup> Internal Revenue Service, 2022, *United States Income Tax Treaties - A to Z*. URL: <https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z>. Diakses pada 3 Februari 2023.

<sup>24</sup> Fitriya, 2022, “Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha?”, mekari klikpajak, URL: <https://klikpajak.id/blog/bagaimana-cara-menghitung-pph-pengusaha/#:~:text=Cara%20menghitung%20pajak%20penghasilan%20orang,Bruto%20-%20PTKP%20x%20Tarif%20Pajak>. Diakses tanggal 13 Mei 2022.



dasar hukum.<sup>25</sup> Apabila ketentuan registrasi data informasi pajak telah dilakukan maka segala hal-hal resiko dapat dihindari dan baik *Google* dan *Youtube* selaku penyedia sumber penghasilan. Hal ini juga dapat dinikmati oleh *creator* sebagai Wajib Pajak karena menikmati hasil dengan bebas dari kekhawatiran akan terjadinya *Tax Evasion*.

Pemanfaatan celah hukum yang dimanfaatkan dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah hal yang terbilang legal. *Tax avoidance* dikatakan legal sebab tidak melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan adanya *Tax avoidance* untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar.<sup>26</sup> Lain hal dengan penyelendupan pajak (*Tax Evasion*) yang dianggap illegal yang berusaha meringankan pajak dengan menggelapkan pajak. Lebih lanjut, *Tax evasion* juga dimakanai sebagai kejahatan dimana pajak dengan sengaja tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan sehingga melanggar hukum perpajakan yang berlaku.<sup>27</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak oleh *Youtube Partner Program* berbeda-beda tergantung jenis kanal yang dimiliki yakni kanal pribadi dan kanal bisnis. Untuk kanal pribadi, ada lagi perbedaan lainnya berdasarkan sudah tidaknya *creator* mendaftarkan informasi pajak dan *Tax Treaty*. Dengan mendaftarkan informasi pajak dan mengisi formulir W-8BEN yang telah disediakan baik secara daring maupun tertulis dalam surat, maka *creator* otomatis terdaftar untuk *Tax Treaty*.

*Tax Treaty* dalam *Youtube Partner Program* hanya berlaku untuk penghasilan yang berasal dari Amerika Serikat. Penghasilan yang berasal dari negara lainnya tidak terkena pungutan pajak apabila *creator* telah mendaftarkan informasi pajak ke dalam *Google Adsense*. *Tax Treaty* yang telah diratifikasi berperan sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang didasari oleh hukum pajak *Youtube Partner Program* yaitu Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat dan diawasi oleh IRS. Untuk pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di Indonesia merupakan urusan masing-masing individu diluar urusan *Youtube* dan *Google*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media. (5).  
Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram Press. (45).

---

<sup>25</sup> Fajar Malvinas, et. al., 2018. *Analisis Tentang Beneficial Owner Dalam Persetujuan 34 Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda Dalam Sengketa Banding PT. Indosat., Tbk, Di Pengadilan Pajak*. *Syiah Kuala Law Journal*. 2(2). 276-286.

<sup>26</sup> Abdul Khadir dan Johan Agustina, *op.cit*, (159).

<sup>27</sup> Fariz Pradipta Mursyid. 2018. *Analisis Komparasi Kebijakan India dan Indonesia 5 Dalam Penanganan Google Tax*. *Journal of International Relations*. 4(3). 349-359.

### **Jurnal:**

- Cosmas Nico Sanjaya. (2000). Biaya Perdagangan Mitra Dan Produk Domestik Bruto Mitra Terhadap Foreign Direct Investment Negara-Negara Asia, Eropa Dan Amerika Di Indonesia Dengan Tax Treaty Sebagai Variabel Moderasi. (4).
- Fajar Malvinas, et. al., (2018). Analisis Tentang Beneficial Owner Dalam Persetujuan 34 Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda Dalam Sengketa Banding PT. Indosat., Tbk, Di Pengadilan Pajak. *Syiah Kuala Law Journal*. 2(2). 276-286.
- Fariz Pradipta Mursyid. (2018). Analisis Komparasi Kebijakan India dan Indonesia 5 Dalam Penanganan *Google Tax*. *Journal of International Relations*. 4(3). 349-359.
- Haidar Ammar Alfaruqi. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. (118).
- Loist Villi Darmawan. (2020). Tinjauan Yuridis *Tax Treaty* Indonesia Dengan Australia Sebagai Upaya Penghindaran Pajak Berganda Dalam Badan Usaha Tetap Ditinjau Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.
- Putrida Sihombing. (2020). Tax Treaty dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia dengan Amerika Serikat. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 303-321.
- Rachmatullah Oky. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf: Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia. (2)
- Widya Permata Sari. (2019). Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Asing Yang Mendapat *Endorse* Dari Pelaku Usaha Di Indonesia.

### **Karya Tulis & Internet:**

- Aditya Fajar Indrawan, 2021, "Youtuber Kena Pajak Pemerintah AS, Begini Hitung-Hitungannya". URL: <https://voi.id/teknologi/39265/youtuber-kena-pajak-pemerintah-as-begini-hitung-hitungannya>. Diakses pada 30 Januari 2023.
- Dian Kurniati, 2021, "Youtube Rilis Persyaratan Layanan Baru, Ada Poin Soal Pembayaran Pajak". URL: <https://news.ddtc.co.id/youtube-rilis-persyaratan-layanan-baru-ada-poin-soal-pembayaran-pajak-30140>. Diakses pada 30 Januari 2023.
- Fitriya, 2022, "Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha?", mekari klikpajak, URL : <https://klikpajak.id/blog/bagaimana-cara-menghitung-pph-pengusaha/#:~:text=Cara%20menghitung%20pajak%20penghasilan%20orang,Bruto%20-%20PTKP%20x%20Tarif%20Pajak>. Diakses tanggal 13 Mei 2022.
- Hasna Nabila, 2021, "Seperti ini Contoh Penerapan Pajak Adsense Youtube jika berlaku", URL : <https://www.cianjurtoday.com/bisnis-today/pr-9657217888/seperti-ini-contoh-penerapan-pajak-adsense-youtube-jika-berlaku?page=2>. Diakses pada 2 Februari 2023.
- Internal Revenue Service, 2022, *United States Income Tax Treaties - A to Z*. URL: <https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z>. Diakses pada 3 Februari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Creator", URL: <https://www.kbbi.web.id/creator>. Diakses pada 2 Februari 2023.
- Pusat Bantuan Google, tanpa tahun, "Persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan Youtube", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=id#:~:text=Bisnis%20di%20AS%20dapat%20dikenai,yang%20diperoleh%20dari%20seluruh%20dunia>. Diakses pada 2 Februari 2023.

Pusat Bantuan Youtube, tanpa tahun, "Mengirim Informasi Pajak Amerika Serikat Anda ke Google", URL:

<https://support.google.com/youtube/answer/10390801#zippy=%2Cnegara-saya-dan-amerika-serikat-memiliki-perjanjian-pajak-penghasilan-bagaimana-cara-memastikan-bahwa-detail-perjanjian-diterapkan%2Cdokumen-mana-yang-perlu-saya-siapkan-jika-info-pajak-amerika-serikat-saya-dilaporkan-untuk-ditinjau>. Diakses pada 2 Februari 2023.

**Hukum Peraturan Perundang-Undangan:**

Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan